

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

ASPIYANI

1431040041



**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2021**

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

ASPIYANI

1431040041

Pembimbing I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
Pembimbing II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang Prinsip demokrasi yang berasal dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa khususnya di kampus masih menjadi berbagai persoalan yang masih harus dibahas di dalam pergolakan dinamika yang terjadi di kampus yakni terkait PEMIRA yang dilaksanakan 2021. yakni terkait bagaimana proses nya . Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah untuk mengungkap bagaimana prinsip prinsip demokrasi pada pemilihan himpunan mahasiswa jurusan. UIN raden intan lampung

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan pengurus himpunan mahasiswa urusan yang terjadi adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan *fieldresearch*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah TEKNIK Purposive yang mana peneliti melakukan observasi selanjutnya mencari informasi melalui wawancara mendalam kepada informan dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori prinsip-prinsip demokrasi, dan pemilu yang demokratis *luber jurdil*

Berdasarkan dari hasil data penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan adapun peneliti mencari informan yang menjadi pihak terkait dalam PEMIRA di fakultas ushuluddin yakni Wakil dekan 3 fakultas ushuluddin, ketua himpunan mahasiswa jurusan/HMPS prodi pemikiran politik islam, Pengurus HMPS prodi pemikiran politik islam serta Panitia pelaksana PANLAK PEMIRA di fakultas ushuluddin UIN raden intan lampung Sementara itu beberapa dari mereka berpandangan bahwa dinamika demokrasi yang terjadi pada proses pemira tahun 2021 dengan adanya demokrasi secara langsung kurangnya kedaulatan yang diberikan kepada mahasiswa dan terlalu didominasi oleh kepentingan kelompok, tingkat sosialisasi mengenai pemira sangat minim dilakukan hal inilah yang mengakibatkan rendahnya partisipasi mahasiswa, sehingga menimbulkan kepada dinamika perpolitikan di kampus yang cenderung lebih tenang. Jika hal ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan beberapa implikasi ini yang akan terjadi yang ***pertama* Akan terjadi minimnya partisipasi politik dari mahasiswa sehingga akan menimbulkan oligarki kekuasaan yang mengakibatkan mahasiswa timbul rasa tidak puas akan pemimpinnya kelak dan yang *kedua* bukan kompetensi yang di utamakan melainkan kepentingan kelompok** Dari hasil penelitian ini direkomendasikan sebagai berikut : yang *pertama* Panitia pelaksana PANLAK harus mensosialisasikan mengenai informasiI terkait pemira kepada seluruh mahasiswa yang ada di kampus uin raden intan lampung pada PEMIRA yang akan datang yang *kedua* kepada mahasiswa yang ikut serta berdinamika dalam kontekstasi politik yang ada di kampus agar tetap memegang teguh pada prinsip kedaulatan mahasiswa karna demokrasi kekuasaan tertinggi pada rakyat dalam hal ini mahasiswa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aspiyani

NPM : 1431040041

Jurusan/Prodi : Pemikiran politik islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Prinsip-prinsip Demokrasi Pada Pemilihan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun campuran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Desember 2021

Penulis



ASPIYANI

NPM. 1431040041



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Demokrasi Pada Pemilihan Pengurus Himpunan
Mahasiswa Jurusan Di Universitas Islam Negri Raden Intan
Lampung
Nama : Aspiyani
NPM : 1431040041
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

Dr.Nadirsah Hawari, M.A
NIP.197406282008011013

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Prinsip-prinsip Demokrasi Pada Pemilihan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** disusun oleh: **Aspiyani**, NPM : **1431040041** Program Studi : **Pemikiran politik islam**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : (.....)

Sekretaris : (.....)

Penguji I : (.....)

Penguji II : (.....)

Penguji III : (.....)

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقًا مِّنْ رَبِّكُمْ لِيُنْفَكْهُمْ وَلِيُنذِرَ أُمَّمَاتِكُمْ أَن يَأْتِيَنَّكُمْ وَأَلِيَّهُ مَرْجِعُكُمْ لِيُنْفَخْ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَلِيَّهُ مَرْجِعُكُمْ لِيُنْفَخْ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَلِيَّهُ مَرْجِعُكُمْ لِيُنْفَخْ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Artinya: Dan (ingatlah juga), takala Rabbmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada :

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta, Kadjwini (Alm) dan Ibunda Zubaidah, yang senantiasa selalu memberikan cinta ,kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan do'anya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Teruntuk kaka dan adiku yang selalu mendukung, memotivasi, serta memberikan do'anya agar selalu semangat dalam mengejar impian yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
3. Keluarga besar HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin yang selalu mendukung penuh agar penulis cepat menyelesaikan studinya.
4. Keluarga besar Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendukung penuh agar penulis cepat menyelesaikan studinya.
5. Muklis siddik,prengki adian putra,dan singgih gunawan yang selalu mene mani dan memberikan *support* serta membantu jalannya penulisan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Aspiyani yang dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Mei 1995 ialah anak ke empat dari enam bersaudara yang tercipta dari cinta dan doa sepasang Insan yaitu Ayahanda Kadjwini dan Ibunda Zubaidah, adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 05 Sukajawa , di kecamatan tanjung karang barat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung
2. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP PGRI 3 Bandar Lampung, Provinsi Lampung
3. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 07 kemiling, di kecamatan tanjung karang barat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Program Studi Pemikiran Politik Islam
5. Pernah Menjadi salah satu tim perwakilan dalam acara kongres Himpunan Mahasiswa politik se-Indonesia(HIMAPOL) Tahun 2017
6. Pernah sebagai Kepala bidang pemberdayaan umat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin 2018-2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur dipanjatkan khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Prinsip-prinsip Demokrasi Pada Pemilihan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung”** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Ibu Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan adab UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak,Dr Nadirsah Hawari, M.A selaku pembimbing I dan Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama juga segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung ;

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam angkatan 2014
8. Sahabat-sahabat terdekat baik di dunia perkuliahan maupun di dunia organisasi yang telah memberi dukungan dan motivasi
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Desember 2021

Penulis,

ASPIYANI
NPM. 1431040041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	6
I. Kerangka Teoritik	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Demokrasi	11
B. Mekanisme Demokrasi.....	12
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi	13
D. Ciri-Ciri Demokrasi	17
E. Kriteria Pemilu Yang Demokratis.....	18
F. Pentingnya Demokrasi Bagi Mahasiswa	20
G. Organisasi Kampus Dan Kepemimpinan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Uin Raden Intan Lampung	25
B. Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Tahun 2016	28
C. Organisasi Mahasiswa	33

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Prinsip Jujur Adil Langsung Dalam Pemilihan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam.	34
B. Tahapan Pemilihan HMJ/HMPS Di Fakultas Ushuluddin	40
C. Fungsi Dan Keberadaan Mahasiswa Di Lingkungan Kampus	41
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	44
B. Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal skripsi ini. Adapun proposal skripsi ini berjudul, **“prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan pengurus Himpunan mahasiswa jurusan di universitas islam negeri raden intan lampung”**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang

berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Dalam sebuah organisasi banyak kegiatan yang dilakukan dimana semua anggota organisasi harus berpartisipasi didalamnya. Organisasi yang aktif dan bagus akan sering melatih para anggotanya baik dalam hal akademis maupun kepemimpinan. Dalam hal akademis contohnya memberikan tentoran kepada adik kelas, pelatihan membuat karya tulis, membuat penelitian yang bekerja sama dengan dosen atau pihak kampus dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan misalnya melakukan training kepemimpinan bagi anggota dan para calon anggota, membuat even atau sebuah acara yang otomatis membutuhkan sebuah kepanitiaan, dengan adanya kepanitiaan tersebut maka disana dilatih jiwa kepemimpinan anggota organisasi, dan masih banyak lagi yang lain.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berbicara di depan umum serta bebas dipilih dan memilih secara langsung bebas dan rahasia.

Pemilihan Umum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pemilihan Raya (PEMIRA) yang diselenggarakan oleh Kampus UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Pemilihan Raya pada dasarnya untuk mengukur apakah pemerintahan itu demokratis atau tidak indikatornya ada pada bagaimana

pemerintahan tersebut menjalankan proses PEMIRA yang berasaskan kepada Pemilihan Raya yang LUBER dan JURDIL.

Program Studi Pemikiran Politik Islam merupakan pelaksana akademik yang secara hirarki berada dibawah koordinasi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Prodi Pemikiran Politik Islam adalah program studi yang mempelajari tentang berbagai kajian teori politik islam klasik maupun pemikiran politik konvensional dengan merujuk pada naskah literatur klasik dan kontemporer.¹

Universitas islam negeri(UIN) Raden intan lampung adalah perguruan tinggi islam Negeri yang berada di kelurahan/kecamatan sukarama bandar lampung,kota bandar lampung propinsi lampung.Didirikan pada 26 oktober 1968 (surat keputusan menteri agama R.I NO.187 tahun 1968- sebagai IAIN) 7April 2017 (peraturan presiden no.38 tahun 2017- sebagai UIN).

Berdasarkan penegasan judul diatas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini penelitian ini membahas tentang, prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan pengurus Himpunan mahasiswa jurusan di universitas islam negri raden intan lampung

B. Alasan memilih judul

1. Alasan objektif

- a. penulis ingin mengetahui prinsip-prinsip demokrasi pemilihan pengurus organisasi mahasiswa uin raden intan lampung yakni himpunan mahasiswa jurusan HMJ
- b. Dalam penulisan ini mengandung kajian yang membahas mengenai prinsip demokrasi pada pemilihan organisasi mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan HMJ uin raden intan lampung yang di dalamnya memiliki keterkaitan

¹ <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id>

dengan program studi yang dipelajari penulis pada jurusan pemikiran politik islam

2. Alasan subyektif
 - a. bagaimana prinsip demokrasi pada pemilihan organisasi mahasiswa uin raden intan lampung pada himpunan mahasiswa jurusan HMJ
 - b. Kota bandar lampung dan kampus uin raden intan lampung merupakan objek yang dekat yang dekat dengan tempat tinggal saya sebagai peneliti sehingga mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Hakikat demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

Untuk dapat mengajarkan kehidupan berdemokrasi, perlu memahami prinsip demokrasi dan menciptakan budaya demokrasi yang membutuhkan proses pembelajaran dan pengamalan. Kita perlu mengetahui bahwa budaya demokrasi tidak dapat dilakukan secara instant. "*Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it*"².hal ini berarti dapat dimaknai, bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya.

"Democracy is not a machine that would go on itself, but

² Gandal, J.E. dan Finn, E.S. (1992). Teaching Democracy, Freedom Paper USA, (2)

must be consciously reproduced, one generation after another"³, hal ini dapat dipahami bahwa demokrasi bukan seperti mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu, secara substantif dalam dimensi jangka panjang, yakni untuk membangun karakter bangsa yang demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Jika tidak dilaksanakan secara "trial and error" atau "taken for granted", tetapi didesain secara sistemik dan sistematis untuk membina dan mengembangkan prinsip-prinsip, nilai dan budaya warga negara demokratis, partisipatif dan berkeadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintahan demokrasi dituntut adanya tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat itu wujudnya bisa secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Bentuk pemerintahan yang demokratis itu disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintah yang demokratis itu biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Sistem demokrasi di Indonesia, baik legislatif maupun eksekutif keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Setelah keduanya dipilih, kemudian bersama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat lewat kebijakan politik dan aturan hukum. Dalam memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat itu keduanya harus berpijak pada nilai kebersamaan dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual⁴. Mahasiswa juga sebagai setiap

³ Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network.*

⁴ Knopfemacher. (1979). *Mahasiswa Dalam Perguruan Tinggi.* Jakarta: Gramedia.

orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun⁵. Organisasi mahasiswa dapat digolongkan sebagai pendidikan yang nonformal sekaligus juga informal, karena dalam penyelenggaraan organisasi mahasiswa ada perencanaan kegiatan yang diadakan satu tahun sekali, yang disebut dengan rapat kerja tahunan, dan juga bersifat pendidikan informal karena dalam menjalani kegiatan dalam suatu organisasi mahasiswa, banyak pendidikan yang dapat diterima berdasarkan pengalaman di lapangan. Idealnya suatu organisasi memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Begitu juga halnya dengan organisasi mahasiswa. Intinya mahasiswa harus bisa mengembangkan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa. Seperti pengembangan intelektual akademis, tanggungjawab moral, dan keterampilan untuk memecahkan problematika yang dihadapi masyarakatnya yang berguna ketika terjun ke masyarakat nantinya. Oleh sebab itu untuk mengembangkan peran tersebut dapat dilakukan dengan bergabung dengan organisasi mahasiswa.

Mahasiswa merupakan insan intelektual yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah sebagai tempat belajar, berhimpun dalam organisasi kemahasiswaan juga merupakan sarana belajar bagi setiap mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial dan kemampuan religiusnya. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan *miniature state* atau *student government* yang melaksanakan tugas dan fungsi seperti sebuah negara. Konsekuensi dari organisasi kemahasiswaan sebagai student government ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Hal ini diungkapkan oleh Sitepu (2012, hlm. 10) yang menyatakan bahwa politik adalah segala hal yang terkait dengan

⁵ Sarwono. (1989). *Mahasiswa dan Peranannya Dalam Perguruan Tinggi*. Bandung: Pustaka.

“penyelenggaraan negara dan pemerintahan”. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan maka seorang mahasiswa sedang belajar berpolitik.

Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdapat dua tujuan terkait organisasi mahasiswa yakni :

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

Kemudian peran organisasi mahasiswa di kampus menentukan demokratis tidaknya tatanan keorganisasian di tataran mahasiswa dalam perguruan tinggi. Segala bentuk politik seyogyanya dikesampingkan agar tidak terjadi polemik. Jika tidak, benih-benih jiwa demokratis yang diharapkan lahir dari perguruan tinggi hanya menjadi isapan jempol. Lihatlah beberapa kejadian belakangan ini yang menimpa beberapa organisasi kemahasiswaan di beberapa perguruan tinggi. Kejadian ini, tentunya, menunjukkan bahwa hubungan antara mahasiswa yang berhimpun dalam sebuah organisasi kemahasiswaan dengan birokrasi kampus tidak "sehat". Mahasiswa yang menuntut sebuah keterbukaan lagi-lagi di

kebiri oleh kaum-kaum yang memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan. Seakan-akan di skat dengan tembok yang begitu tebal. sehingga kebiri ini pun terus terjadi bagaikan penjara di rumah sendiri "keterbukaan, kebebasan berekspresi, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan"⁶.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan terdapat beberapa organisasi mahasiswa di kampus diantaranya Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Peneliti menjadikan HMJ sebagai obyek penelitian terkait dengan pemilihan umum yang melibatkan seluruh mahasiswa berpartisipasi dalam kancap demokrasi melalui pemilihan umum yang dilakukan untuk menentukan kepengurusan HMJ.

Perbedaan orientasi politik organisasi-organisasi dapat menjelaskan arah tujuan organisasi-organisasi mahasiswa Islam serta instrumen atau ideologi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Perbedaan ideologi antar organisasi mempengaruhi program-program yang dilakukan oleh masing-masing organisasi baik melalui atas nama organisasi ekstra, maupun HMJ. Tetapi point utamanya adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus Islam mempunyai peran sebagai penjematan untuk memberikan pendidikan sosial politik dikampus sehingga ketika status mahasiswa maka spirit dan nilai-nilai (ideologi) organisasilah yang nantinya akan diperjuangkan bukan hanya nilai nilai pragmatisme.⁷

Selain itu peran organisasi ekstra kampus Islam merupakan laboratorium untuk implementasi apa yang sudah

⁶ <https://www.kompasiana.com/choirul14/597085f7a666643435677c52/demokrasi-kampus>

⁷ Wira Yudha Alam, *Aktivisme Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus*, h. 3.

didapatkan dikampus atau dalam istilah Antonio Gramsci menjadi Intelektual Organik. Pemilihan mahasiswa merupakan salah satu wadah untuk berkompetisi antar organisasi mahasiswa ekstra kampus baik yang berbasiskan ideologi Islam maupun yang tidak. Selain itu arena tersebut untuk menguji kemampuan maupun kualitas kader- kader organisasi dan juga menunjukkan eksistensi mereka karena siapapun kandidatnya merupakan representasi masing-masing organisasi. Dimana mereka akan dinilai dan dipilih oleh perwakilan seluruh mahasiswa Ilmu Politik sehingga bila salah satu organisasi memenangkannya merupakan nilai tambah bagi organisasi untuk menyebarkan ideologi maupun memperbanyak kader-kadernya dengan HMJ sebagai instrumennya.

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Dalam sebuah organisasi banyak kegiatan yang dilakukan dimana semua anggota organisasi harus berpartisipasi didalamnya. Organisasi yang aktif dan bagus akan sering melatih para anggotanya baik dalam hal akademis maupun kepemimpinan. Dalam hal akademis contohnya memberikan tentoran kepada adik kelas, pelatihan membuat karya tulis, membuat penelitian yang bekerja sama dengan dosen atau pihak kampus dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan misalnya melakukan training kepemimpinan bagi anggota dan para calon anggota, membuat even atau sebuah acara yang otomatis membutuhkan sebuah kepanitiaan, dengan adanya kepanitiaan tersebut maka disana dilatih jiwa kepemimpinan anggota organisasi, dan masih banyak lagi yang lain.

Menegakkan sistem demokrasi dalam dunia kampus harus dimulai dari memberdayakan mahasiswa selaku pelaku utama dalam dunia perpolitikan kampus. Dalam hal ini seluruh elemen mahasiswa harus berpartisipasi tanpa melihat latar belakang organisasinya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung adalah perguruan tinggi Islam Negeri yang berada di kelurahan/kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. Didirikan pada 26 Oktober 1968 (Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187 Tahun 1968 - sebagai IAIN) 7 April 2017 (Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2017 - sebagai UIN). Dengan demikian hampir setiap momen pemilihan mahasiswa organisasi mahasiswa ekstra kampus ikut serta berkompetisi. Karena dengan menempatkan kader-kadernya pada organisasi intra kampus menunjukkan eksistensi sekaligus kualitas kadernya. Hal inilah yang menyebabkan setiap organisasi mahasiswa ekstra kampus berlomba-lomba memperebutkan posisi ketua HMJ.

Dengan demikian hampir setiap momen pemilihan mahasiswa organisasi mahasiswa ekstra kampus ikut serta berkompetisi. Karena dengan menempatkan kader-kadernya pada organisasi intra kampus menunjukkan eksistensi sekaligus kualitas kadernya. Hal inilah yang menyebabkan setiap organisasi mahasiswa ekstra kampus berlomba-lomba memperebutkan posisi ketua HMJ. Adapun peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana jalannya demokrasi yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung terkait bagaimana proses pemilihan pengurus organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan mahasiswa yang saya khususkan dengan HMJ pemikiran politik Islam di Fakultas Ushuluddin pada tahun 2021 ini. Agar kita mengetahui jalannya demokrasi, cara yang dilakukan organisasi mahasiswa pada proses pemilihan tersebut apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk meneliti atau mengambil judul tentang prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung tahun 2021.

Adapun skripsi ini berjudul, **“PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PADA PEMILIHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan definisi di atas maka maksud dari judul penelitian ini adalah untuk merumuskan masalah yang diteliti yakni:

1. Apakah prinsip-prinsip demokrasi sudah di terapkan dalam pemilihan pengurus himpunan mahasiswa jurusan prodi pemikiran politik islam yang jujur adil dan langsung ?

E Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi diterapkan atau tidaknya prinsip-prinsip demokrasi dan pemilu jujur, adil dan langsung pada pemilihan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang politik dan menambah ilmu pengetahuan melalui kajian tentang prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan organisasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang tentu saja berguna untuk membuka wawasan mahasiswa tentang politik yang ada di dalam kampus
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan

khususnya Ilmu Pemikiran Politik Islam dimasa yang akan datang serta sebagai rujukan dan referensi bagi akademisi yang akan melakukan suatu penelitian dengan tema yang sama.

G, Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan⁸. peneliti mencari sumber data tentang judul penelitian di atas, penelitian ini tidak sama dengan peneliti peneliti terdahulu. Meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah, dan skripsi yang mengkaji tentang prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan organisasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung .Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul ini diantaranya :

1. Karya ilmiah yang berjudul Pemilihan Ketua HMJ dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Keterlibatan PMII Dan HMI Dalam Pemilihan Ketua Hmj Ilmu Politik)
2. Judul skripsi ke-dua yang penulis temukan adalah Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Ketua OSIS Di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016

H. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah sebuah bentuk ilmiah yang memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Menurut pendapat Mardais, bahwa metode penelitian diterjemahkan sebagai bentuk untuk dapat melakukan suatu teknis yang melibatkan pendapat secara bersama agar dapat tercapai suatu tujuan tertentu, sedangkan pada penelitian

⁸ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:

adalah suatu upaya pada bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk mendapatkan beberapa fakta dalam mewujudkan kebenaran secara berurutan.

Metode Penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode yang tepat dan benar diharapkan peneliti dapat mengantarkan kepada analisis terhadap masalah-masalah yang dijadikan tema skripsi secara kritis. Dapat terlaksana sebuah penelitian yang sesuai dengan metode yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), menurut Lexy Moleong penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat⁹.

Peneliti telah melakukan pra observasi ke lapangan guna melihat secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data awal yang diperlukan. Penelitian ini yakni bertujuan untuk melihat suatu fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini bersifat *Deskriptif*. Menurut Sarifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu suatu penelitiannya menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang

paradigma, 2005), h.7

⁹ Lexy J Meolong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), h.5

tertentu secara factual dan cermat¹⁰. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat populasi dan pada objek tertentu¹¹. Pendapat Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai susunan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik secara lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa¹². Data primer juga disebut dengan responden dimana responden tersebut terdiri dari *key informan* dan informan. Dalam penelitian ini untuk menentukan *key informan* menurut Spradley dalam (Meoloeng), informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

- 1) Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.
- 2) Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- 3) Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
- 4) Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung di

¹⁰ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.7.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, h.308

olah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan informasi

Informan dalam penelitian ini adalah Wakil dekan 3 fakultas ushuluddin Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) fakultas ushuluddim serta Mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang mengikuti Pemilihan Pengurus HMJ.

b. Data Sekunder

Menurut Suryo Subroto data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui dokumen-dokumen tempat penelitian. Adapun data sekunder di penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan arsip-arsip yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja sukarela dan problematikanya. Data sekunder dalam penelitian ini yakni literatur dan referensi yang berkaitan dengan Demokrasi serta Pemilihan Pengurus Organisasi Kampus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 3 tahap, yaitu wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar. Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang teliti¹³. Peranan yang paling penting dalam observasi adalah pengamat atau peneliti yang akan melakukan suatu penelitian, pengamat harus jeli dalam mengamati setiap kejadian, gerak dan proses. Dengan kata lain pengamat harus objektif¹⁴. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti rentang waktu tahun 2021 atau setelah diadakannya

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rienika Cipta, 2016), h.1991

¹⁴ *Ibid*, h.76.

pemilihan pengurus HMJ di Fakultas Ushuluddin.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan secara langsung kepada responden. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁵.

Ketika melakukan wawancara, pewawancara harus memperhatikan sikap pada saat datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, akan sangat berpengaruh kegiatan Tanya jawab antar pewawancara dengan narasumber.

Interview yang digunakan adalah interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas adalah interview bebas menanyakan pertanyaan apa saja yang masih termasuk kedalam penelitian. Dan interview terpimpin adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun dan sistematis¹⁶.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu foto-foto, jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen yang sudah disimpan dan dibukukan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses bekerja dengan data, mengurutkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting serta apa yang sudah dipelajari oleh peneliti dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

¹⁵ Lexy J Meolong, *Metedologi Penelitian.....*, h.135

¹⁶ *Ibid*, h.127.

lain¹⁷.

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Menurut Kartini Kartono analisa kualitatif adalah data mengenai opini, keterampilan, aktivitas sosialitas, kejujuran atau sikap simpati dan lainnya. Jenis penelitian kualitatif berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata. Serta dengan metode deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada atau mengidentifikasi masalah¹⁸.

Menurut HB Sutopo bahwa dalam proses analisis data ada 3 komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti, yaitu:

- a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam catatan file. Proses ini berlangsung selama pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data.
- b. Penyajian Data
Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini, data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematiknya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun sajian data dapat berupa gambar, matriks, tabel maupun bagan.
- c. Verifikasi Data
Verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada dilapangan dan mencari makna dari

¹⁷ Lexy J Meolong, *Metedologi Penelitian...*, h.103

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, h.345

data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative. Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir¹⁹.

Dalam melakukan verifikasi data, peneliti menggunakan Teori Triangulasi Data. Dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan²⁰ Pengumpulan dokumen dan data dilapangan dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh.

I. Kerangka Teoritik

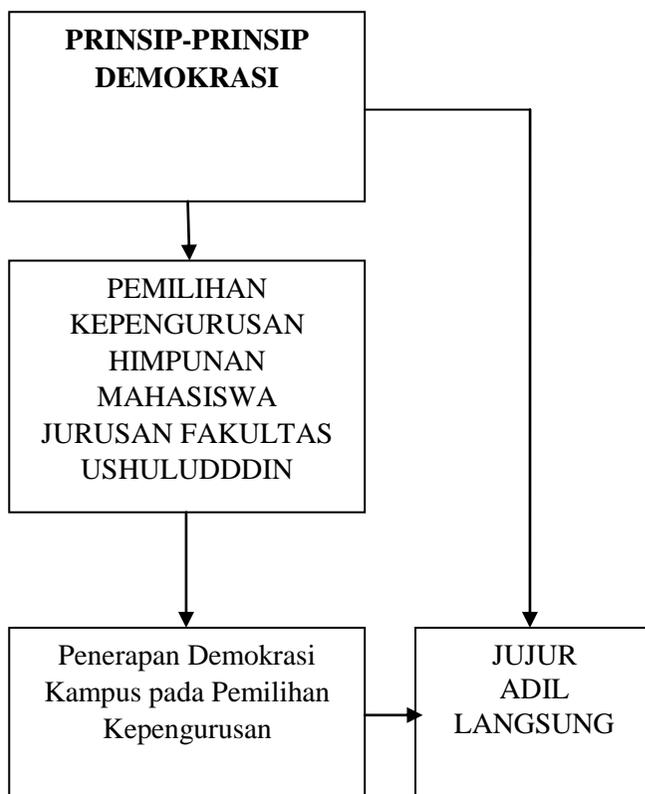
Kampus diibaratkan sebagai miniatur sebuah negara yang didalamnya juga ada lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif sendiri mulai dari tingkat program studi sampai universitas yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), BEM-Fakultas dan BEM-Universitas, sedangkan lembaga legislatif nya adalah DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa). Setiap tahun ormawa kampus tersebut selalu mengalami regenerasi kepengurusan atau pergantian pengurus. Salah satu moment pergantiannya kepengurusannya ditandai dengan adanya pemira.

Pemilihan Umum Raya (Pemira) merupakan wahana bagi mahasiswa dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih seseorang yang dianggap pantas dan layak sebagai wakilnya untuk duduk di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik tingkat universitas, fakultas hingga jurusan. Setiap mahasiswa memiliki kebebasan individu dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin undang-undang,

¹⁹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.23-24

²⁰ Lexy J Meolong, *Metedologi Penelitian...*, h.330

untuk itu pihak kampus harus melindungi hak politik mahasiswa dari berbagai ancaman dari pihak luar.



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik(*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*)²¹.

Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem

²¹ Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 2

demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa²². Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.

Kemudian, dalam perkembangannya mengalami dua kali bentuk transformasi demokrasi yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi kuno pada abad ke 5 sebelum Masehi serta beberapa negara kota di Italia pada masa abad pertengahan dan transformasi yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa negara atau negara nasional yang luas²³. Akibat transformasi demokratis tersebut, terjadi perubahan tatanan secara mendasar bentuk demokrasi sebagai akibat terjadinya perpindahan dari negara kota ke negara bangsa. Robert A. Dahl mengemukakan delapan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan demokrasi pada wilayah negara bangsa yang luas, yaitu perwakilan; perluasan yang tidak terbatas; batas-batas demokrasi partisipatif; keanekaragaman; konflik; poliarki; pluralisme sosial dan organisasional; dan perluasan hak-hak pribadi²⁴. Dari sini terlihat bahwa bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa Yunani kuno sangat berbeda dengan bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa sekarang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat

²² Sulardi, 2012, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang, Setara Press, hal. 23

²³ Robert A. Dahl, 1998, *On Democracy*, USA, Yale University Press, hlm. 120.

Dikutip dari Kusnu Goesniadhie S, 2009, Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerninan Kodrat

²⁴ *Ibid*, hlm. 31

Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan²⁵

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat²⁶

Meskipun demokrasi itu telah menimbulkan banyak penafsiran, menurut Ellya Rosana dalam Jurnal TAPIS yang berjudul NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA menuturkan bahwa banyak kritik dan kendala dalam penerapan sistem Demokrasi, namun harus dipahami bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan sesuatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Demokrasi juga memandang adanya kesetaraan dalam politik dan dapat melindungi hak-hak individu atau hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, serta hak lainnya²⁷

²⁵ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), hal. 4.

²⁶ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hal. 2.

²⁷ Ellya Rosana, "NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA", Jurnal TAPIS

B. Mekanisme Demokrasi

Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu²⁸

a. Transformasi (*reforma*, dalam istilah *Linz*)

Terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokratis. Transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan pihak oposisi dan atau dibandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi. Transformasi gelombang ketiga biasanya berkembang melalui lima fase utama, yang empat diantaranya terjadi didalam sistem otoriter. Fase-fase tersebut yaitu²⁹

1. Munculnya kelompok pembaharu yaitu munculnya sekelompok pemimpin atau orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin di dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan ke arah demokrasi adalah sesuatu yang dikehendaki atau perlu.
2. Memperoleh kekuasaan. Para pembaharu demokratis tidak hanya harus ada dalam rezim otoriter, mereka juga harus berkuasa dalam rezim itu.
3. Kegagalan liberalisasi
4. Mengikutsertakan kelompok oposisi. Kelompok pembaharu demokratis biasanya segera memulai proses demokratisasi begitu mereka memegang kekuasaan. Lazimnya hal ini

²⁸ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.146

²⁹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal.162.

melibatkan konsultasi dengan para pemimpin dari kelompok oposisi, partai politik dan kelompok serta lembaga utama masyarakat.

b. Pergantian (*replacement*, atau ruktura dalam istilah Linz)

Terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses *replacement* ini terdiri dari tiga fase yang berbeda: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.

c. *Transplacement* atau “*ruptforma*”

Terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Pada tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi di mana dominasi kelompok konservatif menimbulkan *replacement*. Pemerintah harus didorong dan atau ditarik ke dalam perundingan formal atau informal dengan pihak oposisi. Di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal atau anti demokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah. Karena itu mereka melihat faedah perundingan.

d. Dialektika *transplacement*

Sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, pemerintah sibuk dengan liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. *Kedua*, pihak oposisi mengeksploitasi pelonggaran ini dan memanfaatkan melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera mampu menjatuhkan

pemerintah. *Ketiga*, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasi kekuasaan politik. *Keempat*, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan untuk mengadakan transisi yang disetujui kedua belah pihak.

Dengan demikian, proses politik yang mengarah pada *tranplacement*, sering ditandai oleh tarik menarik antara pemogokan, protes dan demonstrasi disatupihakdenganrepresi,pemenjaraan, tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang di lain pihak.

C. Prinsip-Prinsip demokrasi

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*)³⁰ Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

³⁰ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, hal. 122.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafie (2005) yakni:

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum yang bebas
3. Adanya manajemen yang terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya pradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
8. Adanya pers yang bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10. Adanya musyawarah
11. Adanya Persetujuan
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara
15. Adanya perlindungan hak asasi
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas

17. Adanya persaingan keahlian
18. Adanya mekanisme politik
19. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara
20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah

Agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, ada beberapa prinsip yang harus dipertahankan dalam kehidupan berdemokrasi.

Prinsip ini antara lain;

1. Negara berdasarkan konstitusi

Prinsip dari demokrasi yang pertama adalah negara berjalan sesuai dengan konstitusi atau undang-undang. Undang-undang sendiri merupakan suatu hukum atau norma politik yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

2. Peradilan tidak memihak dan bebas

Prinsip yang kedua dari negara demokrasi adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dari intervensi pemerintah. Jadi suatu negara yang demokratis tidak dibenarkan melakukan intervensi atau tekanan terhadap peradilan, sehingga peradilan harus bersifat netral. Dengan adanya peradilan yang netral maka keputusan yang dibuat oleh peradilan dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

3. Kebebasan berpendapat dan berserikat

Prinsip negara demokrasi selanjutnya adalah adanya kebebasan berpendapat dan berserikat setiap warganya. Sehingga setiap warga negara akan memiliki kebebasan untuk berorganisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Dalam penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

4. Adanya pergantian pemerintahan

Prinsip dari negara demokrasi selanjutnya adalah adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pergantian ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

5. Keadaan rakyat sama dimata hukum

Prinsip demokrasi selanjutnya adalah bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, penegakan hukum berlaku untuk semua rakyat tanpa memandang latar belakang pendidikan, ekonomi atau sosial.

6. Adanya jaminan hak asasi manusia

Selanjutnya, prinsip demokrasi dalam praktiknya juga akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya Hak Asasi Manusia (HAM) setiap rakyat. Bahkan pelaksanaan HAM ini menjadi salah satu pilar utama dari demokrasi. Pemerintah serta seluruh institusinya harus menghormati dan menghargai HAM, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM.

7. Adanya kebebasan pers

Prinsip demokrasi yang terakhir adalah adanya kebebasan pers. Artinya pers dijamin kebebasannya untuk menyampaikan kritik, saran serta masukan kepada pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang di cetuskan oleh Austin ranney bahwa menurutnya cakupan

demokrasi yakni kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, konsultasi dengan rakyat, kekuasaan mayoritas.

1. kedaulatan rakyat

Pembangunan atau pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Kedaulatan rakyat yang berarti bahwa membuat keputusan-keputusan pemerintahan yang pokok berada ditangan warga masyarakat dan bukan di tangan orang tertentu atau kelas yang berkuasa. hal ini bukan berarti bahwa, seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan pemerintahan, melainkan rakyat dapat mendelegasikan sebagian kekuasaan mereka kepada wakilnya di lembaga legislative, eksekutif dan legislatif. yang dimaksud rakyat berdaulat adalah warga negara dewasa yang mampu menunjukkan kesediaan dan kesetiaan mematuhi norma-norma masyarakat

2. kesetaraan politik

Setiap orang dalam system itu diberikan kesempatan untuk berkembang dalam politik. Sehingga semua kepentingan dapat di akomodasi oleh pemerintah. Persamaan politik berarti bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pproses pembuatan keputusan politik negara. prinsip persamaan politi berarti persamaan kesempatan, bukan persamaan partisipasi yang sesungguhnya dari warga masyarakat. dalam hal ini tidak mungkin mengharap kesamaan partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. karena akan ditemukan perbedaan baik dalam kemampuan maupun kemauan diantara warga negara dalam memanfaatkan kesamaan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi politik tersebut. Di Indoensia ini dimaknai sebagai persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Sebuah konsep dimana semua warga negara yang memenuhi syarat perundangan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, serta memiliki hak yang sama di muka hukum.

3.konsultasi dengan rakyat

Prinsip konsultasi kepada rakyat berarti bahwa, keputusan-keputusan mengenai kebijakan manakah yang paling cocok untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus oleh rakyat sendiri. buakn oleh penguasa tanpa pertanggung jawaban kepada rakyat.sejalan dengan hal tersebut demokratis atau tidaknya kebijakan pemerintah sangat bergantung pada bagaimana cara kebijakan tersebut dibuat.mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembuatan secara terlembaga. Popular consultation memastikan bahwa rakyat terlibat dalam membuat keputusan politik. Popular consultation memiliki dua persyaratan. Pertama, pemerintah harus memiliki semacam mekanisme kelembagaan di mana pejabat publik mempelajari kebijakan publik yang ingin diadopsi dan diberlakukan oleh rakyat. Kedua, setelah memastikan preferensi rakyat, pejabat publik kemudian harus memasukkan preferensi tersebut ke dalam undang-undang, baik yang disetujui atau tidak

4.mayoritas berkuasa

Kekuasaan masyarakat kongkrit dalam masyarakat terbagi atas prosedural,contoh pemilu di negara-negara ketiga yang di intervensi oleh pemerintah.Keputusan dalam pemerintahan demokrasi pada hakikatnya merupakan pilihan atas berbagai macam pandangan,yang masing-masing didukung oleh rakyat berdaulat untuk menentukan pilihan kebijakan tersebut,berlaku prinsip majority rule.prinsip pemerintahan rakyat menghendaki agar keputusan mayoritas hanya di ambil setelah aspirasi kaum mayoritas didengar dan di pertimbangkan.Dalam demokrasi tentu saja pihak yang berkuasa adalah yang memenangkan pemilihan umum. Mereka yang mendapatkan suara terbanyak disebut sebagai mayoritas dan berhak untuk memerintah. Dalam konteks pembuatan keputusan atau kebijakan, tentu saja kehendak mayoritas yang terwakili dalam pemerintahan atau parlemen menjadi pertimbangan utama. Namun demikian mayoritas berkuasa selalu diiringi oleh

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas

1. Prinsip demokrasi
 - a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
 - b. pemerintahan konstistusional
 - c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
 - d. Pers yang bebas
 - e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
 - f. Pengawasan terhadap administrasi Negara
 - g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
 - h. Pemerintahan yang diskusi
 - i. Pemilihan umum yang bebas
 - j. Pemerintahan berdasarkan hukum

2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
 - a. Pemusatan kekuasaan Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga.
 - b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan.
 - c. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
 - d. *Rule of Power* Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah..
 - e. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit
 - f. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
 - g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
 - h. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers.

- i. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia
- k. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.

D. Ciri-ciri demokrasi

Negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ³¹

- A. Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat kepada hukum, bukan seakan akan negara hukum sama dengan demokrasi. negara hukum tidak mesti negara demokratis. pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum
- B. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
- C. Pemilu yang bebas
- D. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa badan perwakilan rakyat mengambil keputusan-keputusan-keputusanyasecara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak
- E. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

³¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 125.

E. Kriteria Pemilu Yang Demokratis

Pelaksanaan pemilu memiliki keterkaitan yang erat antara negara demokrasi dan negara hukum. Menurut Mahfud MD dalam demokrasi pemilu di Indonesia mengatakan dan menegaskan pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi, melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang membentuk produk hukum serta dapat melakukan pengawasan pelaksanaan hukum³² Sedangkan menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi³³

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

2. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan

³² Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), h. 36

³³ Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal.13

3 Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi.

Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

4. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakilrakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu

5. Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6. Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

7. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8. Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

Pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik³⁴

F. Pentingnya Organisasi Bagi Kehidupan Mahasiswa

Dengan mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, dan hal tersebut bisa menjadi pengalaman tersendiri dalam menjalani studi serta sebagai bekal dalam mencari sebuah pekerjaan. Berikut sebagian kecil manfaat ketika kita mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan :

1. Melatih Leadership Ketika ikut organisasi, pastinya akan ada banyak hal yang harus diurus seperti acara-acara organisasi, yang tentunya melibatkan banyak orang, baik itu sesama mahasiswa anggota organisasi ataupun orang-orang di luar organisasi. Mahasiswa yang ikut organisasi kemahasiswaan umumnya memiliki sikap dan karakter yang lebih aktif dibanding mereka yang tidak ikut organisasi. Mereka lebih banyak terlatih dalam mengutarakan pendapat di hadapan orang lain ataupun menggerakkan dan mengarahkan teman-teman sesama anggota ketika organisasi sedang mengadakan suatu acara. Di dunia kerja, keterampilan leadership ini sangatlah bermanfaat sekali dalam dunia pekerjaan. Seringkali di lowongan-lowongan kerja memasukkan leadership sebagai salah

³⁴ Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi.* (Semarang : LP2I

satu kriteria untuk calon karyawan barunya, meskipun untuk posisi level staf yang sebenarnya tidak memiliki bawahan. Mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa dipandang lebih memiliki inisiatif serta dapat memotivasi dan mengarahkan diri sendiri dan rekan dalam bekerja

2. Belajar Mengatur Waktu Dengan ikut organisasi, memang waktu yang biasa seorang mahasiswa gunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas akan berkurang. Sementara itu, banyaknya tugas kuliah atau waktu pelaksanaan pengumpulan tugas sama dengan banyaknya tugas dan waktu pelaksanaan kegiatan organisasi itu. Agar keduanya dapat berjalan sama- sama lancar dan tidak ada yang terbengkalai, manajemen waktu yang baik mutlak harus kamu lakukan. Mungkin pada awalnya dalam melaksanakan manajemen waktu, kita merasa kewalahan. Namun, jika kita bisa membiasakan diri dengan keadaan tersebut maka lama kelamaan kita bisa terbiasa dalam melaksanakan manajemen waktu, sehingga dalam dunia kerja nantinya tidak merasa kaget dengan adanya banyaknya tugas di kantor dan mampu menyelesaikan segala tugasnya dengan sistem manajemen waktu tersebut.
3. Memperluas Jaringan atau *Networking*, Di dalam organisasi akan banyak orang baru yang dikenal. Teman-teman mahasiswa seangkatan, senior, mahasiswa dari jurusan lain, orang lain atau praktisi di bidang organisasi atau jurusan yang kamu pilih, dan sebagainya. Mereka ini (bisa juga disebut sebagai jaringan) jangan diremehkan, karena merupakan aspek yang penting, terutama bagi yang baru lulus S1 dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dari mereka itulah, seorang mahasiswa akan dapat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan.
4. Mengasah Kemampuan Sosial, Mereka yang tergabung dalam organisasi, umumnya secara sosial juga lebih aktif dibanding mereka yang tidak ikut organisasi. Jika ikut organisasi, seorang mahasiswa juga akan terlatih berinteraksi dengan

berbagai macam tipe orang. Tidak hanya teman-teman satu jurusan, tapi juga dengan teman-teman dari program studi yang lain. Dengan ini, tentu akan semakin memperluas pemahaman kamu akan berbagai karakteristik orang. Sesuai pengetahuan umum, manusia adalah individu unik. Semakin luas pergaulan, maka pemahaman akan manusia dapat semakin kaya. Saat bekerja nanti, keterampilan ini akan sangat membantu. Karena dengan kemampuan ini akan lebih berpengalaman berinteraksi dengan berbagai karakter rekan kerja

5. *Problem Solving* dan Manajemen Konflik. Banyak berinteraksi dengan orang dengan berbagai karakteristiknya, merupakan hal yang lumrah jika satu atau dua kali terlibat konflik dengan mereka. Demikian juga di dunia kerja, di mana deadline yang mendesak, rekan kerja yang kurang kooperatif atau sukanya menjatuhkan rekan kerja di depan atasan, dan lainnya yang rentan menimbulkan konflik. Jika sudah terbiasa mengatasi masalah dan konflik, kamu tidak akan kaget lagi dan sudah terbayang hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalah agar tidak sampai menurunkan performa kerja.

G. Organisasi Kampus Dan Latihan Kepemimpinan

Organisasi kemahasiswaan yang aktif dan baik adalah organisasi yang sering memberikan pelatihan para anggotanya baik dalam hal akademis maupun kepemimpinan. Dalam hal akademis contohnya memberikan bimbingan keilmuan dan teknis mengikuti perkuliahan kepada juniornya, pelatihan membuat karya tulis, membuat penelitian yang bekerja sama dengan dosen atau pihak kampus, dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan misalnya mengadakan latihan kepemimpinan bagi anggota dan para calon anggota, membuat kegiatan atau sebuah acara yang otomatis membutuhkan sebuah kepanitiaan, dengan adanya kepanitiaan tersebut maka di sana dilatih jiwa kepemimpinan anggota organisasi, dan masih banyak lagi yang

lain.

Organisasi kampus mengadakan latihan kepemimpinan sebagai salah satu kegiatan rutin, yang dalam konsep manajemen hampir sama dengan yang dikenal dengan latihan kepekaan, dalam mendidik kaderkadernya untuk menempa kepribadian, keluwesan berkomunikasi, dan ketepatan para kader dalam bertindak. Organisasi mahasiswa memiliki banyak peranan penting di kampus. Sebagaimana pengalaman mengajarkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan di kampus, di masyarakat, dan berbangsa dan bernegara yang mengalami perubahan karena peran serta dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa tersebut. Mahasiswa adalah “*The agent of change*”, hal itu benar adanya karena banyak perubahan yang terjadi melibatkan peran mahasiswa di dalamnya. Pengaruh interpersonal dan perilaku kelompok merupakan tekanan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku dan ekspektasi kelompok memiliki dampak yang kuat terhadap perilaku individu dan pengaruh interpersonal pada perilaku organisasi³⁵ :

1. Perilaku Kelompok. Kelompok terbentuk karena tindakan manajerial dan juga karena usaha individu. Manajer menciptakan kelompok kerja untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kelompok semacam itu, yang dibentuk oleh keputusan manajemen disebut kelompok formal. Kelompok juga terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan para anggotanya. Kelompok tersebut yang disebut kelompok informal, berkembang karena minat yang sama dan pertemanan. Walau tidak dibentuk oleh manajemen, kelompok ini dapat mempengaruhi kinerja individu dan organisasi. Dampaknya dapat bersifat positif atau negatif, bergantung pada tujuan dari para anggota kelompok. Jika kelompok ini memutuskan secara informal untuk memperlambat kecepatan kerja, norma ini akan memberikan tekanan kepada individu yang ingin tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut. Manajer

³⁵ Ivancevich, John M. et. al. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

yang efektif mengenali konsekuensi dari kebutuhan seorang individu akan afiliasi.

2. Perilaku dan Konflik Antarkelompok. Ketika kelompok berfungsi dan berinteraksi dengan kelompok lain, mereka mengembangkan serangkaian karakteristik kelompok mereka sendiri yang unik, termasuk struktur, kekompakan, peran, norma, dan proses. Sebagai akibatnya, kelompok mungkin bekerja sama atau bersaing dengan kelompok lain, dan persaingan antar kelompok dapat menimbulkan konflik. Walau konflik antar kelompok mungkin akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi organisasi, terlalu banyak konflik atau konflik antar kelompok yang salah mungkin memiliki dampak yang sangat negatif. Oleh karena itu, pengelolaan konflik antar kelompok merupakan aspek yang penting dalam mengelola perilaku organisasi.
3. Kekuasaan dan Politik. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang anda inginkan atau menyebabkan sesuatu terjadi berdasarkan cara yang anda inginkan. Banyak orang dalam masyarakat merasa kurang nyaman dengan konsep kekuasaan, dan beberapa benar-benar tersinggung olehnya. Ini karena inti dari kekuasaan adalah pengendalian atas orang lain. Namun, kekuasaan merupakan kenyataan dalam organisasi. Manajer menerima kekuasaan baik dari sumber organisasi atau individu. Seseorang memiliki kekuasaan akibat posisinya dalam hirarki formal di organisasinya. Ia dapat mengendalikan evaluasi kinerja dan kenaikan gaji. Namun, ia juga mungkin memiliki kekuasaan karena rasa hormat dan kagum rekan kerjanya atas kemampuan dan keahlian yang ia miliki. Oleh karena itu, manajer harus memahami konsep kekuasaan sebagai suatu kenyataan dalam organisasi dan peran manajerial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pada Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa di setiap perguruan

tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan intra ini dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah: perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, komunikasi antar mahasiswa, pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa, pembinaan dan pengembangan kaderkader bangsa yang dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. Di antara fungsi organisasi tersebut, fungsi pengembangan keterampilan organisasi dan kepemimpinan mahasiswa merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan mahasiswa, selain calon ilmuwan, juga calon pemimpin bangsa di masa depan. Mahasiswa adalah sebagian kecil dari generasi muda yang nanti diharapkan sebagai pemimpin.

Beberapa proses perilaku memberikan kehidupan pada suatu organisasi. Ketika proses proses ini tidak berfungsi dengan baik, masalah akan muncul. Proses yang berkontribusi pada kinerja organisasi yang efektif³⁶ :

1. Proses Komunikasi. Keberlangsungan organisasi bergantung pada kemampuan manajemen untuk menerima, mengirimkan, dan menindak- lanjuti informasi. Proses komunikasi menghubungkan orang-orang dalam organisasi. Informasi

³⁶ *Ibid*

mengintegrasikan aktivitas-aktivitas internal dari organisasi. Hati-hati sering dilakukan informasi dapat dipelintir untuk menjatuhkan saingan.

2. Proses Pengambilan Keputusan. Kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi bergantung pada pemilihan tujuan yang tepat dan pengidentifikasian cara pencapaian. Dengan integrasi faktor perilaku dan struktural yang baik, manajemen dapat meningkatkan probabilitas keputusan berkualitas tinggi yang akan diambil. Organisasi bergantung pada keputusan individu dan juga keputusan kelompok, dan manajemen yang efektif memerlukan pengetahuan akan kedua jenis keputusan itu.

Organisasi intra kampus adalah lembaga yang mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler, yang meliputi keilmuan, pengembangan minat dan bakat serta sosial kemasyarakatan dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari kampus.

Di kampus sendiri organisasi mahasiswa ini berperan sangat penting. Organisasi merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa pada petinggi-petinggi kampus seperti rektor, dekan, dosen dan sebagainya. Tidak selamanya keputusan yang dibuat oleh petinggi kampus dapat diterima begitu saja oleh mahasiswa. Jadi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi tersebut melalui organisasi inilah disampaikan. Tanpa ada organisasi intra kampus mungkin kebijakan apapun yang dikeluarkan pihak atasan mahasiswa akan pasrah saja menerimanya, karena mereka tidak ada sarana untuk menyampaikan pendapat mereka. Sangat banyak contoh perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bergabung di organisasi mahasiswa. Misalnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai media bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan tentang mahalnya biaya kuliah,

minimnya fasilitas kampus yang tidak seimbang dengan kenaikan biaya kuliah dan lain sebagainya. Dalam forum yang formal nanti perwakilan dari BEM ini akan menyampaikan keluhan mahasiswa ini kepada pihak rektorat contohnya. Dari sana pihak rektorat dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang membebani mahasiswa. Maka dari itu pihak rektorat akan melakukan fungsi *controlling*-nya. Tidak hanya BEM, organisasi kemahasiswaan lainnya baik organisasi internal maupun organisasi eksternal kampus, juga bisa langsung menyampaikan aspirasinya, seperti contohnya melakukan aksi damai menuntut kenaikan biaya kuliah. Memang tidak jarang aksi yang awalnya damai berujung dengan kericuhan karena pihak kampus mungkin tidak merespon mereka.

Namun itu hanyalah sebagian kecil dari contoh peran penting organisasi mahasiswa di kampus. Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa adalah Lembaga intra Kemahasiswaan tingkat Universitas. Dewan Mahasiswa ini sangat independen dan merupakan kekuatan yang cukup diperhitungkan sejak Indonesia Merdeka hingga masa Orde Baru berkuasa. Ketua Dewan Mahasiswa selalu menjadi kader pemimpin nasional yang diperhitungkan pada jamannya.

Dewan Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga eksekutif sedangkan yang menjalankan fungsi legislatifnya adalah Majelis Mahasiswa. Di Fakultas-fakultas dibentuklah Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema), atau di beberapa perguruan tinggi disebut Senat Mahasiswa. Para Ketua Umum Kodema atau Ketua Umum Senat Mahasiswa ini secara otomatis mewakili Fakultas dalam Majelis Mahasiswa. Keduanya dipilih secara langsung dalam Pemilu Badan Keluarga Mahasiswa untuk masa jabatan dua tahun. Sedangkan Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih dalam sidang umum Majelis Mahasiswa.

Pengembangan wawasan menjadi titik kunci dari keberhasilan organisasi ekstra kampus dalam mendidik kader-kadernya. Adapun wawasan yang biasanya jauh lebih ditekankan pada proses kaderisasi di ekstra adalah wawasan yang mampu

membangun dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Rasa nasionalisme yang tinggi inilah yang biasanya dimiliki oleh sebagian besar kader organisasi ekstra kampus. Peralannya, di organisasi inilah sebenarnya kebanggaan, kecintaan, dan rasa memiliki ditumbuhkan lewat kajian-kajian sederhana tentang ke-Indonesiaan. Dari diskusi sederhana itulah semua wawasan tentang ke-Indonesiaan didoktrinkan hingga kader-kadernya mampu benar-benar menjiwai rasa nasionalisme mereka. Hal ini sebenarnya mampu mengisi kekurangan yang dimiliki oleh kampus, yaitu kurangnya pendidikan tentang ke-Indonesiaan. Oleh karena itulah sebenarnya, organisasi ekstra kampus ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk melengkapi ilmu yang mereka pelajari di kampus.

Organisasi kampus sangat berperan dalam pembekalan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Karena salah satu syarat yang biasa diminta untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri adalah dari karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan. Kemampuan ini bisa diasah dari berorganisasi. Namun sayangnya, aktivis kampus kebanyakan hanya berkutat di dunia sosial politik kampus, kemampuan menulis ilmiah dan keilmuan sangat rendah. Sebaiknya, ketika mahasiswa menjadi aktivis kampus jangan hanya berkutat pada rapat dan penyelenggaraan kegiatan saja jika ingin menjadi aktivis kampus yang komplit dan prestatif. Hendaknya dibuat juga kegiatan-kegiatan kompetitif lainnya, Seperti lomba menulis, debat, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya yang juga dipertimbangkan nantinya untuk pembekalan studi ke luar negeri.

Akan jauh lebih baik jika mahasiswa tidak hanya pandai dalam memimpin rapat dan beretorika semata, melainkan mereka bisa menjadi aktivis kampus yang rajin membaca, menulis, mengikuti perlombaan, dan terjun di kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini untuk menumbuhkan budaya ilmiah dan prestatif dalam budaya organisasi kampus, dibutuhkan peran seorang senior atau pimpinan organisasi.

Penumbuhan nilai, budaya, dan norma di dalam internal organisasi sejatinya dipegang oleh para senior atau pimpinan organisasi. Oleh sebab itu seorang pemimpin dan senior dalam organisasi hendaklah memiliki bekal yang bisa dicontoh oleh kader-kader di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network*
- Dokumentasi Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Gandal, J.E. dan Finn, E.S. (1992). *Teaching Democracy, Freedom Paper USA*, (2) 1-28
- HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.23-24
- <https://www.kompasiana.com/choirul14/597085f7a666643435677c52/demokrasi-kampus>
- Ivancevich, John M. *et. al.* (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: paradigma, 2005), h.7
- Knopfemacher. (1979). *Mahasiswa Dalam Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia.
- Lexy J Meolong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), h.5
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 2
- Robert A. Dahl, 1998, *On Democracy, USA*, Yale University Press, hlm. 120. Dikutip dari Kusnu Goesniadhie S, 2009, *Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat*

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), h.7.

Sarwono. (1989). *Mahasiswa dan Peranannya Dalam Perguruan Tinggi*. Bandung: Pustaka.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rienika Cipta, 2016), h.1991

Sulardi, 2012, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Malang, Setara Press, hal. 23

Wira Yudha Alam, *Aktivisme Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus*, h. 3.